WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah khususnya pada pendayagunaan arsip secara efektif, efisien, serta tertib perlu diatur kode klasifikasi arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tangungjawab di bidang pengolahan Arsip dinamis.
6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kearsipan.
7. Unit pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
8. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip statis dan pembinaan kearsipan di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan.
9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara

berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

12. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
13. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
15. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
16. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penggunaan Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan tata tertib pengelolaan Arsip dan memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi Arsip Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. Klasifikasi Arsip; dan
b. Kode Klasifikasi Arsip.

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

(1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi

Pencipta Arsip yang meliputi:

a. fungsi fasilitatif; dan
b. fungsi substantif.

(2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja Perangkat Daerah.

(3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

BAB III
KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 5

(1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 September 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 28

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH

KOTA PEKANBARU

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000 UMUM

- 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
  - 000.1.1 Telekomunikasi
  - 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
    - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
    - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
    - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
  - 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
    - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
    - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
    - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
  - 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
  - 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
  - 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
  - 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
    - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
    - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
    - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
  - 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
    - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
    - 000.1.8.2 Penghijauan
    - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
    - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
    - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
    - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
  - 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
    - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
    - 000.1.9.2 Pemasangan
  - 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
    - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
    - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
  - 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
  - 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai,Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2 PERLENGKAPAN

000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan

000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor

000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

000.2.3 Distribusi

000.2.3.1 Barang habis pakai

000.2.3.2 Barang milik daerah

000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.4.2 Deposit Bahan Pustaka

000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman

000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
000.4.3 Koleksi Pustaka
000.4.3.1 Pembelian
000.4.3.2 Hibah
000.4.3.3 Hadiah
000.4.3.4 Tukar Menukar
000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
000.4.3.6 Terbitan Internal
000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6 Layanan Perpustakaan
000.4.6.1 Keanggotaan
000.4.6.2 Peminjaman
000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
000.4.7.1 MoU
000.4.7.2 Perjanjian kerja sama
000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
000.4.8.1 Pengembangan situs Web
000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10 Konservasi
000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12 Transformasi Digital
000.4.13 Kurasi Digital
000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
000.4.14.1 Perpustakaan Umum
000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5 KEARSIPAN
000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.5.2 Pembinaan Kearsipan

	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)

000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)

000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

000.5.5 Pengelolaan Arsi Terjag (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

000.5.6 Penyusutan Arsip

000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)

000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis	
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
	000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
	000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
	000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan
		000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
		000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
		000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN
- 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.6.2 Pengamanan persandian
  - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripton
  - 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripton
  - 000.6.2.3 Materil sandi: sistem dan peralatan
- 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
  - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
  - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
  - 000.6.3.3 Pelaksanaan
  - 000.6.3.4 Pelaporan
- 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
  - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
- 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
  - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
  - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
  - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
  - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
  - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaa
  - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
  - 000.6.5.7 Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang
  - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
  - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
  - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
  - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
  - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
  - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
- 000.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
  - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
  - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
  - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
  - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
  - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
  - 000.7.2.8 Laporan Berkala
  - 000.7.2.9 Laporan Insidential
  - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
000.7.6 Aksi Strategis Daerah
- 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
- 000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
- 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah

000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
- 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
- 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
- 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
- 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
- 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- 000.8.1.1 Pembentukan
- 000.8.1.2 Pengubahan
- 000.8.1.3 Pembubaran

000.8.2 Uraian Jabatan
- 000.8.2.1 Analisa Jabatan
- 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja

000.8.3 ketatalaksanaan
- 000.8.3.1 Proses Bisnis
- 000.8.3.2 Standar Pelayanan
- 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
- 000.8.3.4 Pelayanan Publik

000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
- 000.8.6.1 Budaya Kerja
- 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi rencana kerja administrasi penelitian, pelaksanaan hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi

000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6.1 Data
000.9.6.2 Statistik
000.9.6.2 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN
100.1 OTONOMI DAERAH
100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

		100.1.4.5 Assosiasi Daerah
	100.1.5	Otonomi khusus dan daerah istimewa
	100.1.6	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
		100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
	100.1.7	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
100.2	PEMERINTAHAN UMUM	
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama
		100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
		100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
		100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, sert aMonitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
		100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
		100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan
		100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
		100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara

		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan,Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM		
	100.3.1	Program Legislasi	
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
		100.3.3.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur
		100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
		100.3.3.3	Keputusan / Ketetapan Walikota
		100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
		100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah
		100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi / Surat Edaran	
		100.3.4.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
		100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
		100.3.4.3	Instruksi / Surat Edaran Kota
		100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5	Surat Perintah	
		100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
		100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
		100.3.5.3	Surat Perintah Walikota

100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama
100.3.7.1 Dalam Negeri
100.3.7.2 Luar Negeri
100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
100.3.11.3 Tata Usaha Negara
100.3.11.4 Perburuhan
100.3.11.5 Arbitrase
100.3.11.6 Sengketa Adat
100.3.12 Perijinan
100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100.3.13.1 Hak Cipta
100.3.13.2 Hak Paten
100.3.13.3 Hak Desain Industri
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5 Hak Merk
100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK
200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3 Bela Negara
200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan

200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
	200.1.4.1	Ketahanan Seni
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah
	200.1.5.7	Database Parpol
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum
200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILU

- 200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
  - 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
  - 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
  - 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
  - 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
  - 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
  - 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
  - 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
  - 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
- 200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
  - 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
  - 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
  - 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
  - 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan
- 200.2.5 Pencalonan Pemilu
  - 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
  - 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
  - 200.2.5.3 Daftar bakal calon
  - 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
  - 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
  - 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
- 200.2.6 Kampanye Pemilu
  - 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
  - 200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
  - 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye

200.2.7 Dana Kampanye
- 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
- 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
- 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye

200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
- 200.2.8.2 Master surat suara
- 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
- 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
- 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah

200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu

200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
- 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
- 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
- 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan

200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
  - 300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
  - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
- 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
  - 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
  - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan Monitoring
  - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan

300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
300.2.2.6 Registrasi BEACON
300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8 Operasi Komunikasi
300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300.2.8.3 Registrasi BEACON
300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
300.2.12.1 Laporan Harian
300.2.12.2 Laporan Bulanan
300.2.12.3 Laporoan Tahunan
300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya

	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan

400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
400.2.2.1 Data gender
400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
400.2.4.2 Data perlindungan anak
400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN
400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400.3.2.2 Pelatihan Sosial
400.3.2.3 Peringatan Hari anak
400.3.2.4 Block Grant
400.3.3 Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400.3.3.3 Pembinaan Program
400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5 Pameran
400.3.3.6 Rakor
400.3.3.7 Sosialisasi
400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
400.3.5.2 Block Grant
400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
400.3.6.2 Block Grant
400.3.6.3 Lomba, festival
400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.6.5 Pendataan
400.3.6.6 Kelembagaan
400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan
400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru

400.3.7.3 Sertifikasi Guru
400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
400.3.7.7 Block Grant

400.3.8 Sekolah Menengah Atas
400.3.8.1 Kurikulum
400.3.8.2 Bahan Ajar
400.3.8.3 Pelatihan
400.3.8.4 Block grant
400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.8.6 Lomba, Sayembara, festival
400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
400.3.8.8 Bantuan siswa miskin

400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
400.3.9.1 Bahan ajar
400.3.9.2 Petunjuk Teknis
400.3.9.3 Block grant
400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran
400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
400.3.9.8 Pendataan
400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusif

400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3 Setifikasi Guru
400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
400.3.10.7 Block grant
400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi

400.3.11 Penilaian Pendidikan
400.3.11 Penilaian Akademik
400.3.12 Penilaian Non Akademik
400.3.13 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
400.3.13.2 Sarana Pendidikan
400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN
- 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
  - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
  - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
  - 400.4.3.1 Olahraga Massal
  - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
  - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
- 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
  - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
  - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
  - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
  - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
  - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
  - 400.4.5.2 Layanan Khusus
- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
  - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
  - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
  - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
  - 400.4.7.2 Kompetisi
  - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
  - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
  - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
  - 400.4.9.1 Industri Olahraga
  - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
  - 400.4.10.1 Daerah
  - 400.4.10.2 Nasional
  - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
  - 400.4.11.1 Standarisasi Keolaragaan
  - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
  - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN
- 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
  - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
  - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)

400.5.2.3 Pengembangan
400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
400.5.5.1 Pengkajian
400.5.5.2 Pengembangan
400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7 Kewirausahaan
400.5.7.1 Kelembagaan
400.5.7.2 Pengaderan
400.5.7.3 Perintisan
400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
400.5.9.1 Standardisasi
400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10.1 Kemitraan
400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN
400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
400.6.2.1 Registrasi Nasional
400.6.2.2 Pelindungan
400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
- 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
- 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
- 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
- 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
- 400.6.4.1 Sejarah
- 400.6.4.2 Pemetaan nilai
- 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
- 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
- 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
- 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah

400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
- 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
- 400.6.5.2 Kekayaan budaya
- 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
- 400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
- 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
- 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
- 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
- 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
- 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
- 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
- 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
- 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
- 400.7.2.9 Pembiayaan darah
- 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
- 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
- 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan Kepulauan
- 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
- 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi

400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
- 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
- 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
- 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat

	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra

400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
- 400.7.8.1 Pengendalian tuberkulosis
- 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
- 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
- 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
- 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia

400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
- 400.7.9.1 Pengendalian malaria
- 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
- 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
- 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan

400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
- 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
- 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
- 400.7.10.3 Penyakit kanker
- 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
- 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan

400.7.11 Penyehatan lingkungan
- 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
- 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
- 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
- 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
- 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi

400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan

400.7.13 Gizi
- 400.7.13.1 Gizi makro
- 400.7.13.2 Gizi mikro
- 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
- 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
- 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi

400.7.14 Kesehatan ibu
- 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
- 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
- 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
- 400.7.14.4 Keluarga berencana
- 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi

400.7.15 Kesehatan anak
- 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
- 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
- 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
- 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja

	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun

400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN

400.7.25 Intelegensia Kesehatan

400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan

400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan

400.7.26 Kesehatan Haji

400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji

400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji

400.7.27 Promosi Kesehatan

400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan

400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran

400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan

400.7.27.4 Hari Kesehatan

400.7.28 Data dan Informasi

400.7.28.1 Statistik kesehatan

400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi

400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan

400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik

400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

400.7.29.4 Obat Asli Indonesia

400.7.30 Pengawasan Keamanan Pengan dan Bahan Barbahaya

400.7.03.1 Penilaian keamanan pangan

400.7.30.2 Standardisasi produk pangan

400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan

400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan

400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.8.2 Fasilitasi

400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota

400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
400.8.2.4 Kasus Keagamaan
400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9 SOSIAL
400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
400.9.3 Rehabilitasi Sosial
400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
400.9.4.2 Tuna susila dan korban traffking perempuan
400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti

	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil

400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan

400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

400.9.14.1 Identifikasi dan analisis

400.9.14.2 Pengembangan kapasitas

400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh

400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas

400.9.14.5 Bantuan Langsung

400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan

400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan

400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial

400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan

400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan

400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa

400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa

400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

400.10.3.1 Lembaga Masyarakat

400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif

400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat

400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan

400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat

400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

400.10.4.1 Budaya Nusantara

400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan

400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial

400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat

400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan

400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran

400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga

400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

400.10.6 Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
- 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
- 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
- 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
- 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
- 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan

400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
- 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.11.2 Pertamanan
  - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
  - 400.11.2.2 Taman Kota
  - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
- 400.11.3 Pemakaman
  - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
  - 400.11.3.2 Pemakaman
  - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
- 400.11.4 Jalur Hijau
  - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
  - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
  - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
  - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
  - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
  - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
  - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
  - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.3 Pencatatan Sipil
  - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
  - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
  - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
  - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan

400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
400.12.5.2 Kualitas Penduduk
400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6 Penyerasian Kependudukan
400.12.6.1 Indikator Kependudukan
400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA
400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk

400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
400.13.7 Pengembangan Sistem
400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8 Pengembangan Materi
400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10 Analisis Sosial
400.13.11 Analisis Ekonomi
400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
- 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
- 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak

400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas

400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
- 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
- 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
- 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
- 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
- 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41 Advokasi dan pencitraan
400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
400.13.42.1 Promosi
400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
400.13.42.3 Produk media komunikasi
400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
- 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
- 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
- 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
- 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.51 Analisis dan evaluasi
- 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
- 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
- 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
- 400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi Informasi
- 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
- 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
- 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan
- 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
- 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
- 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
- 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat

400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media

400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
400.14.4.1 Kliping koran
400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat
400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan
400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
400.14.5.5 Forum Kehumasan
400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN
500.1 KETAHANAN PANGAN
500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
500.1.2.2 Akses Pangan
500.1.2.3 Kerawanan Pangan
500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
500.1.3.1 Distribusi Pangan
500.1.3.2 Harga Pangan
500.1.3.3 Cadangan Pangan
500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500.1.4.1 Konsumsi Pangan
500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7 Bimbingan Teknis
500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri

500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha

500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan

500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan

500.2.2.4 Informasi Perusahaan

500.2.2.5 Pelaku Pasar

500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal

500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri

500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi

500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi

500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik

500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik

500.2.2.14 Informasi Pasar

500.2.2.15 Informasi Hasil Industri

500.2.2.16 Barang Strategis

500.2.2.17 Bahan Pokok Agro

500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar

500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi

500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar

500.2.3.4 Tata usaha

500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi

500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen

500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha

500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan

500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri

500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan

500.2.3.11 Jasa

500.2.3.12 Kerjasama

500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama

500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian

500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran

500.2.3.16 Pengawasan

500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP

500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
- 500.2.4.1 Pengkajian pasar
- 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
- 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
- 500.2.4.4 Pengkajian pasar
- 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
- 500.2.4.6 Sistem informasi
- 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
- 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
- 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang

500.2.5 Bimbingan Teknis
500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
- 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
  - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
  - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
  - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
  - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
- 500.3.3 Produksi
  - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - 500.3.3.2 kehutanan dan Perkebunan
  - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
  - 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
  - 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
- 500.3.4 Pembiayaan
  - 500.3.4.1 Program Pendanaan
  - 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
  - 500.3.4.3 Usaha Permodalan
  - 500.3.4.4 Asuransi dan jasa Keuangan
  - 500.3.4.5 Pembiayaan dan Peminjaman Kredit
  - 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
- 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
  - 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
  - 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
  - 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
  - 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
  - 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
  - 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
- 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
  - 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM

500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5 Advokasi
500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1 Penelitian Koperasi
500.3.8.2 Penelitian UKM
500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN
500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.4.2 Penyuluhan
500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2 Materi Penyuluhan
500.4.2.3 Program Penyuluhan
500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8 Deseminasi
500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan
500.4.3 Planologi Kehutanan
500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan

	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam

	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi

500.4.6.6 Pengamanan Hutan
500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
500.4.6.11 Bina Cinta Alam
500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA

500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1 Pengelolaan Benih
500.4.7.2 Kebun Benih
500.4.7.3 Tegakan Benih
500.4.7.4 Pengadaan Benih
500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.7 Pembibitan
500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
500.4.7.14 Perhutanan Sosial
500.4.7.15 Pengendalian Perladangan

500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
500.4.8.3 Diseminasi
500.4.8.4 Gelar Teknologi
500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.5.2 Perikanan Tangkap
500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan

	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri

	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan

	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat

500.5.7.14 Surat Perintah
500.5.7.15 Rekomendasi
500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
500.5.7.21 Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN
500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.6.2 Perlindungan hortikultura
500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3 Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1 Penilaian Varietas
500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
500.6.4.1 Basis Data Lahan
500.6.4.2 Pengendalian Lahan
500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
500.6.5.4 Kelembagaan
500.6.6 Pembiayaan Pertanian
500.6.6.1 Pembiayaan Program
500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
500.6.6.3 Pembiayaan agrobisnis
500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agrobisnis
500.6.7 Pupuk Pestisida
500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
500.6.7.2 Pupuk Anorganik

	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu\
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standariasi	
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan

500.6.16.2	Investasi
500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik
500.6.17.1	Informasi Pasar
500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot,Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
500.6.26.1	Hak Cipta
500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
500.6.26.3	Hak Paten Biasa
500.6.26.4	Hak Merek
500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28	Pelayanan Hukum
500.6.28.1	Sertifikasi
500.6.28.2	Pertimbangan Hukum

500.6.29 Karantina Pertanian
500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
500.6.29.2 Karantina Hewan
500.6.30 Bimbingan Teknis
500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN
500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.2.2 Pakan Ternak
500.7.2.3 Budidaya Ternak
500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.3 Bimbingn Teknis
500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN
500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.8.2 Tanaman Semusim
500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.4 Tanaman Tahunan
500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500.8.5 Perlindungan Perkebunan
500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN
500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
500.9.2.1 Industri Manufaktur
500.9.2.2 Industri Agro
500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.3 Promosi Industri
500.9.3.1 Industri Manufaktur
500.9.3.2 Promosi Industri Agro
500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
- 500.9.4.1 Industri Manufaktur
- 500.9.4.2 Industri Agro
- 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual
- 500.9.5.1 Industri Manufaktur
- 500.9.5.2 Industri Agro
- 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.6 Industri Hijau
- 500.9.6.1 Industri Manufaktur
- 500.9.6.2 Industri Agro
- 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota

500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri

500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional

500.9.12 Standarisasi
- 500.9.12.1 Standar
- 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
- 500.9.12.3 Infrastruktur Standar

500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
- 500.9.13.1 Kebijakan Industri
- 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
- 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial

500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
- 500.9.14.1 Industri Hijau
- 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
- 500.9.14.3 Energi

500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
- 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
- 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual

500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
- 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah

	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.2.3	Pertambangan
	500.10.2.4	Panas Bumi
	500.10.2.5	Geosains
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Kegeologian	
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin PengirimanData ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
	500.10.7.3	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan

500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan

500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran

500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

500.10.9 Teknik dan Lingkungan

500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT

500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification(WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)

500.10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las

500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi

500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, PemeriksaanKalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi

500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)

	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga

500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasihasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energI
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik

	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antaralain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan

500.10.20 Sertifikasi Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)

500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik

500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik

500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik

500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi

500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan

500.10.22 Standarisasi Kompetensi

500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan

500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan

500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan

500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan

500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan

500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan

500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan

500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)

500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT

500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan

500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara

500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara

500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara

500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara

500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara
500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
500.10.26.1 Ketenagakerjaan
500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral
500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)
500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
500.10.26.12 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral

500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjioan Kaya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak

	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
	500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
	500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan

500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan
500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
500.10.29.17 Pengawasan Teknis
500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis

500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagun aan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi
500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31 Sarana Litbang
500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32 Afiliasi
500.10.32.1 Proyek Percontohan
500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
500.10.32.4 Penyajian Informasi
500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi
500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi
500.10.34.3 Laboratorium
500.10.34.4 Study
500.10.34.5 Teknologi Proses
500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk
500.10.34.7 Teknologi Gas
500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
500.10.36.1 Energi baru terbarukan
500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN
500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan

	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor

500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

500.11.8 Angkutan Penumpang
- 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
- 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
- 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
- 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
- 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
- 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
- 500.11.8.7 Angkutan perintis
- 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum

500.11.9 Angkutan Barang
- 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
- 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
- 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
- 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan

500.11.10 Monitoring Operasional
- 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
- 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda

500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 500.11.11.1 Pedoman Teknis
- 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.11.11.3 Bimtek PPNS
- 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
- 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan

500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
- 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan da danau dan penyeberangan
- 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
- 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
- 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
- 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan

500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.21 Tarif dan Keperintisan
500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24 Angkutan Perkotaan
500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang

500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan

500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan

500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan

500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan

500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan

500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian

500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.28 Pengembangan Keselamatan

500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan

500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan

500.11.29.1 Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum

500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau

500.11.31 Audit Keselamatan

500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia

500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.32 Inspeksi Keselamatan

500.11.32.1 Pedoman keselamatan

500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.33 Parkir

500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir

500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta

500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.12.2 Telekomunikasi

500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi

500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi

500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika

500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi

500.12.3 Penyiaran

500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal

500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah

500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah

500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran

500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal

500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur

500.12.5 Pengendalian Informatika

	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e- Governmen	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual

500.12.14 Kemitraan Komunikasi
- 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
- 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
- 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi

500.12.15 Infrastruktur Informatika
- 500.12.15.1 Jaringan
- 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
- 500.12.15.3 Keamanan Informatika

500.12.16 Sistem dan Data
- 500.12.16.1 Portal dan Konten
- 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
- 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi

500.12.17 Pusat Kerjasama
- 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
- 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral

500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
- 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
- 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
- 500.12.18.3 Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
- 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
- 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
- 500.13.2.3 Industri Pariwisata
- 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
- 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event

500.13.3 Pemasaran Pariwisata
- 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
- 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
- 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
- 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia

500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
- 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
- 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
- 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa

500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
- 500.13.5.1 Pengembangan Ekonom Kreatif Berbasis Media
- 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
- 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi

500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
- 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
- 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
- 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK
- 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
  - 500.14.2.1 Perencanaan
  - 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerjadan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
  - 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan
  - 500.14.2.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
  - 500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus

500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus
500.14.3 Survei
500.14.3.1 Perencanaan
500.14.3.2 Persiapan
500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
500.14.4 Konsolidasil Data Statistik
500.14.4.1 Kompilasi Data
500.14.4.2 Analisis data
500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

500.15 KETENAGAKERJAAN
500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan

500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6 Bina Pemagangan
500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
500.15.8.3 Bursa Kerja
500.15.8.4 Analisis Jabatan
500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
500.15.9.1 Antar Kerja
500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11 Standardisasi Profesi
500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
500.15.12.2 Perjanjian Kerja

500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.14.1 Pengupahan
500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan
500.15.20 Bina Penegakan Hukum
500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
500.15.21.2 Hasil kajian, erekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16 PENANAMAN MODAL
500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha

500.16.4 Promosi Penanaman Modal
- 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
- 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
- 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
- 500.16.4.4 Promosi Sektoral
- 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
- 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi

500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
- 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
- 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
- 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional

500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
- 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
- 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
- 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
- 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
- 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
- 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
- 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
- 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
- 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
- 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
- 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
- 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
- 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
- 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian

500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
- 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
- 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
- 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah

500.17.4 Sengketa Tanah
- 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
- 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi

500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
500.18.3.1 Penyiapan Lahan
500.18.3.2 Penyiapan Sarana
500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
500.18.5 Partisipasi Masyarakat
500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
500.18.5.4 Pelayanan Investasi
500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8 Pengembangan Usaha
500.18.8.1 Kewirausahaan
500.18.8.2 Produksi
500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
500.18.9.2 Pengembangan Sarana
500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10 Penyerasian Lingkungan
500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600.1 PEKERJAAN UMUM
600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
600.1.2.2 Kelembagaan
600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.3.2 Manajemen Mutu
600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)
600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
- 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
- 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan

600.1.8 Pembangunan Jalan
- 600.1.8.1 Standar dan Pedoman
- 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
- 600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
- 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng

600.1.9 Preservasi Jalan
- 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
- 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
- 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
- 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan

600.1.10 Pengelolaan Jembatan
- 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
- 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
- 600.1.10.3 Teknik Jembatan
- 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus

600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
- 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
- 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
- 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan

600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol
- 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
- 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol

600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
- 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
- 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan

600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
- 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
- 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
- 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
- 600.1.14.5 Kelembagaan

600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
- 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
- 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
- 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
- 600.1.15.5 Kelembagaan

600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
- 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
- 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
- 600.1.16.5 Kelembagaan
- 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
- 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
- 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
- 600.1.17.5 Kelembagaan
- 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
- 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
- 600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
- 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
- 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
- 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
- 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
- 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
- 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
- 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.5.2 Analisa Teknik

	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khsus	
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	

600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2 Pengembangan Materi
600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.16.1 Antar Sektor
600.2.16.2 Antar Wilayah
600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4 AnalisaManfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2 Perencanaan
600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota

600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
- 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
- 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
- 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan
- 600.3.4.1 Peta Dasar
- 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
- 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
- 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
- 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
- 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
- 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungan

600.4.5 Dampak Lingkungan
- 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
- 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
- 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
- 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
- 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
- 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
- 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
- 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
- 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
- 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
- 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
- 600.4.8.1 Pengembangan
- 600.4.8.2 Pemanfaatan
- 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
- 600.4.8.4 Keamanan Hayati

	600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
	600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2 Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
	600.4.10.1 Perangkat mitigasi
	600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim
	600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
	600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
	600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
	600.4.14.1 Pemantauan
	600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah
	600.4.15.1 Pembatasan sampah
	600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan
	600.4.18.1 Penyidikan
	600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut

600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19 Komunikasi Lingkungan
600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
600.4.23.1 Pengelolaan Data
600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25 Standarisasi dan teknologi
600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN
700.1 PENGAWASAN INTERNAL
700.1.1 Rencana Pengawasan
700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan MasyarakaT
700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN
800.1 SUMBER DAYA MANUSIA
800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5 Pengangkatan ASN
800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)

	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	KenaikaN Pangkat/ Golongan/ Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Koe Etik Disiplin Pmberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik ASN
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara

	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	

800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
800.1.12.3 Tabungan Perumahan
800.1.12.4 Bantuan Sosial
800.1.12.5 Pakaian Dinas
800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10 Rekam Medis

800.1.13 Administrasi Perseorangan
800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
800.1.13.4 Sekretaris Daerah
800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

800.1.14 Penilaian Kompetensi
800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
800.2.2.4 Modul-modul diklat
800.2.2.5 Panduan fasilitator
800.2.2.6 Saran/ rekomendasi penyelenggaraan diklat
800.2.2.7 Notulen sosialisasi/ Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat

800.2.3 Widyaiswara
800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
- 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
- 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
- 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
- 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
- 800.2.4.5 Sistem informasi diklat
- 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
- 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat

800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
- 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
- 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
- 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
- 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

900.1.2 Penyusunan Anggaran
- 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
- 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
- 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
- 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
- 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
- 900.1.3.2 Pendapatan
- 900.1.3.3 Belanja
- 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
- 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan
- 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)	

Pilkada danBantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan

900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal

900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional

900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah

900.1.12 Anggaran Daerah

900.1.12.1 Anggaran Daerah

900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah

900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah

900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
900.1.13.5	Pinjam dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah,

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
	900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara ain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RISNANDAR MAHIWA

Salinan sesuai dengan aslinya